



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN**

Tahun Sidang	:	2025 - 2026
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	<i>Courtesy Call</i>
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 14 Januari 2026
Waktu	:	Pukul 11.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Lounge, Gedung Nusantara III Lantai 6
Acara	:	1. Pertemuan dengan Duta Besar Sudan H.E. Dr. Yassir Mohamed Ali; 2. Lain-lain
Ketua Rapat	:	Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, L.c., M.A. / Ketua BKSAP DPR RI (F-PKS/A-442)
Sekretaris Rapat	:	Reny Amir SH., M.M., MLI /Kepala Bagian Set. KSB
Hadir	:	1. Ravindra Airlangga / Wakil Ketua BKSAP DPR RI (F-PG/A-300); 2. Ilyas / Tenaga Ahli BKSAP; 3. Sekretariat KSB, Biro KSAP.

I. Pendahuluan

Ketua BKSAP DPR RI menerima kedatangan Duta Besar Sudan untuk Indonesia H.E. Dr. Yassir Mohamed Ali pada pukul 13.00 WIB dan pertemuan terbuka untuk umum.

II. Kesimpulan / Keputusan:

1. Ketua BKSAP DPR RI menyambut baik kehadiran Duta Besar Sudan untuk Indonesia di DPR RI. Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat untuk menjaga hubungan Indonesia-Sudan di berbagai bidang, khususnya kerjasama antar-parlemen.
2. Indonesia dan Sudan telah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1957, dengan fondasi sejarah, solidaritas negara – negara berkembang, serta nilai-nilai bersama dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB).

3. Hubungan bilateral Indonesia – Sudan ditandai oleh transisi dari pendekatan kemanusiaan berbasis krisis menuju penjajakan kemitraan strategis, di tengah konflik internal Sudan yang masih berlangsung sejak 2023. Hubungan ini tetap dipererat oleh semangat ukhuwah dan persaudaraan yang berakar pada nilai-nilai Islam dan ikatan historis kedua bangsa.
4. Lebih lanjut disampaikan bahwa keterlibatan parlemen sangat penting dalam mengatasi berbagai tantangan global, terutama dalam mendorong kerjasama selatan – selatan serta membahas krisis kemanusiaan dan konflik yang terjadi di dunia, termasuk di Sudan. Kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk membahas situasi terkini di Sudan.
5. Ketua BKSAP menyatakan bahwa Indonesia berada di pihak Sudan karena situasi yang terjadi di Sudan karena bahwasanya perlakuan atas penjajahan dan kedaulatan negara merupakan amanat konstitusi Indonesia yang tertuang pada UUD RI 1945.
6. Ketua BKSAP juga menyatakan bahwa Indonesia dapat menyuarakan kondisi terkini Sudan di Dewan HAM PBB mengingat Indonesia juga telah menjadi Presiden di Dewan HAM PBB. Sudan sangat memerlukan dukungan secara Politis oleh Indonesia terkait isu tersebut.
7. BKSAP memandang stabilitas Sudan sebagai kepentingan bersama kawasan dan dunia Islam. Disampaikan juga bahwa DPR RI mendukung langkah yang diambil Pemri yang menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengerahkan 20.000 personel penjaga perdamaian, termasuk untuk Sudan, dengan mandat yang jelas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
8. Melalui diplomasi parlemen, DPR RI siap mendukung proses perdamaian yang inklusif, rekonsiliasi sosial, serta pemulihan pascakonflik yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.
9. Ketua BKSAP dan Duta Besar Sudan juga membahas rencana diadakannya Focus Group Discussion yang membahas situasi terkini di Sudan dengan mengundang Kemlu RI dan organisasi – organisasi lainnya di RI guna mendapatkan informasi terkini terkait situasi di Sudan.
10. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga membahas terkait MoU kerjasama antara Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Kesehatan Sudan guna memudahkan akses obat – obatan dari RI kepada masyarakat Sudan.
11. Ketua BKSAP menekankan kembali komitmen untuk terus melanjutkan hubungan antar kedua parlemen negara yang sudah berjalan dengan baik guna menunjang kerjasama Pemerintah RI dan Pemerintah Sudan diberbagai sektor

III. Penutup

Pertemuan diakhiri dengan pertukaran cinderamata dan foto bersama pada pukul 11.40 WIB.

Jakarta, 14 Januari 2026

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,



Reny Amir, S.H., M.M., MLI

197305121992032001